

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun belakangan ini, diberbagai belahan dunia isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) tengah hangat diperbincangkan. Perhatian khusus ini tak lepas dari adanya kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk, serta perkembangan pesat pasar keuangan. Kekurangan *financial literacy* diakui sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang minim informasi sehingga dapat menimbulkan dampak negatif (OECD/ INFE 2009). Pemahaman akan *financial literacy* saat ini semakin diperlukan demi terciptanya penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan financial yang baik, masyarakat dituntut bukan hanya menguasai praktek demi mengikuti perkembangan pasar keuangan. Hal dimaksudkan agar pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan tidak salah. Selain itu pengelolaan keuangan yang baik akan mampu menyejahterakan hidup individu itu sendiri.

Bagi para pelaku UMKM sangat diperlukannya pemahaman akan literasi keuangan untuk mengelola keuangannya. Literasi keuangan merupakan kemampuan dari individu tersebut dalam pengaplikasian pengelolaan keuangan, baik dalam mendapatkan dan mengevaluasi informasi yang umumnya diperuntukan untuk pengambilan keputusan dengan melihat konsekuensi yang diterima. Menurut Jumpstar Coalition (*dalam Huston, 2010*) mendefinikan bahwa literasi keuangan dapat terjadi ketika seorang individu memiliki keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu untuk mengelola sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan. Kurangnya *financial literacy* dapat mengakibatkan kurangnya akses lembaga keuangan serta menghambat keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Marwan (*Stabilitas, 4 Februari 2014*) salah satu persyaratan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah terciptanya suatu sistem keuangan yang baik dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara global literasi keuangan diakui sebagai elemen penting dari stabilitas dan pembangunan (OECD/ INFE, 2009) karena diperlukan untuk menciptakan efisiensi yang berperan penting dalam pembentukan stabilitas sistem keuangan (*Republika, 03 Desember 2013*).

Semakin meningkatnya pemahaman akan *financial literacy* mengakibatkan semakin tinggi jalannya pembiayaan pembangunan, hal ini didasari pada semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan. *Financial literacy* meningkat ketika masyarakat sudah percaya kepadab produk lembaga jasa keuangan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dalam bentuk lainnya (UU No.10 Tahun 1998).

Saat ini telah terdapat banyak sekali alokasi sumber daya yang ada, produk yang ditawarkan adalah Asuransi, Pasar Modal, Pembiayaan (*Multi Finance*), Pegadaian, Dana Pensiun, Perbankan, dan Buku Perencanaan Rumah Tangga. Melihat produk yang dipaparkan diatas diharapkan masyarakat mampu menerapkan mengelola sumber daya yang mereka miliki secara baik dan benar, sehingga mampu untuk menyejahterakan hidup mereka. Pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi para pelaku usaha, khususnya bagi pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM penting untuk dijadikan sasaran keterbukaan akses kedalam lembaga keuangan atau biasa disebut financial inklusif, karena UMKM merupakan salah satu ujung tombak perekonomian negara yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan daya serap daya daya manusia lebih tinggi lagi, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran serta tindakan kriminalitas. Dengan demikian financial inklusif perlu ditingkatkan bagi para UMKM sehingga perekonomian negara bisa terangkat lewat usaha-usaha mandiri yang ada. Di Indonesia UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa yang tidak bisa dikesampingkan, hal ini dikarenakan UMKM memiliki daya tahan yang lebih dibanding dengan jenis usaha lainnya. Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 hingga krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap bertahan dalam menghadapi perubahan dunia.

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998). Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap mengelola keuangan (Remund, 2010). Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan istilah literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidebmmnce*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (OJK,2013a). Definisi ini mengalami penyempurnaan dalam Peraturan OJK No. 76 tahun 2016 dan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan menambah aspek sikap dan perilaku keuangan di samping pengetahuan, keterampilan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan keuangan. Pengertian literasi keuangan tersebut menjadi pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (POJK, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia 2013**

NO	INDEKS LITERASI KEUANGAN	%
1	Well literate	21,84
2	Sufficient literate	75,69
3	Less literate	2,0
4	Not literate	0,41
	<b>Total</b>	100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2013

Menurut Wibowo (2014) salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dikarenakan rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* yaitu hanya sebesar 21,84 %, *sufficient literate* sebesar 75,69%, *less literate* sebesar 2,06% dan *not literate* sebesar 0,41%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 59,7%.

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang ada di kawasan Asia. Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang cukup besar pada tahun 1998, dan sektor yang tetap bertahan adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari segi jumlah usaha, untuk tahun 2013 pelaku usaha dengan skala UMKM merupakan mayoritas dengan pangsa 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.

Menurut laporan Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) menyebutkan bahwa 49% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki akses yang cukup baik terhadap lembaga keuangan, artinya hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik jika dibandingkan dengan Negara Asia lainnya. Seperti Malaysia misalnya sekitar 65%, Singapura 98%, Thailand 73%, India 55 %, China 65%, Filipina 75% dan Pakistan 85%. Selain itu hampir 100% penduduk dari Malaysia dan Thailand memiliki akun di bank, sementara Indonesia hanya memiliki 41% (Mit.dkk.2014).

OJK juga telah mengadakan survei *Baseline* Portofolio Investasi UMKM rumah tangga, yang bertujuan untuk mengetahui pola dan perilaku investasi dan pembiayaan keuangan UMKM yang meliputi tingkat literasi keuangan, pendapatan dan faktor demografi. Secara umum, UMKM memiliki rasio aset keuangan di bawah 9%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan UMKM terhadap produk-produk keuangan masih

relatif rendah. Ketika UMKM mengalami kesulitan keuangan dalam usaha, sebanyak 26,4% UMKM cenderung meminjam kepada keluarga, teman, atasan, tetangga, atau arisan. Selanjutnya, sebanyak 14,7% responden memilih untuk memotong pengeluaran usaha ketika mengalami kesulitan keuangan dalam usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa pilihan pinjaman ke bank masih relatif kecil, yaitu 7%. Responden cenderung menggunakan cara pembiayaan informal ketika mengalami kesulitan keuangan (OJK, 2014).

Permasalahan dalam hal *financial knowledge* keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya, terbukti berdasarkan survey yang dilakukan Raharjo dan Wirjano (2012), kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah membuat pembukuan apapun terkait manajemen usahanya, seharusnya pelaku UMKM membuat pembukuan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam keuangannya. Namun fakta yang ditemukan adalah kesadaran pelaku UMKM untuk membuat pembukuan untuk manajemen keuangan usahanya masih rendah.

Masalah *financial behaviour* keterampilan keuangan tidak hanya dalam hal anggaran dan investasi saja, dalam hal kredit juga para pelaku UMKM mengalami kendala. Pengetahuan mengenai kredit para pelaku UMKM masih sangat rendah. Pelaku UMKM tidak begitu paham faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan kredit, sehingga sulit bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan berbagai pertimbangan saat mengajukan kredit, seperti pertimbangan tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Seharusnya para pelaku UMKM mampu mempertimbangan berbagai hal pada saat akan mengajukan kredit agar dapat menggunakan kredit secara bijaksana.

Selanjutnya permasalahan *financial skill* keterampilan keuangan adalah dalam hal investasi. Tidak banyak pelaku UMKM yang terjun ke dunia investasi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penyebab rendahnya minat pelaku UMKM untuk berinvestasi dikarenakan para pelaku UMKM tidak cukup paham dan bahkan sama sekali tidak tahu mengenai apa itu investasi. Sehingga para pelaku UMKM memilih tidak berinvestasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan pelaku UMKM tentang investasi masih sangat rendah.

Terdapat masalah lain yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, yaitu masalah mengenai sikap keuangan yang dimiliki. Kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki sikap yang buruk mengenai keuangan, ditandai dengan rendahnya motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan usahanya, padahal motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam manajemen keuangan sangat penting. Buruknya sikap keuangan yang dimiliki para pelaku UMKM juga ditandai dengan pemikiran yang mudah merasa puas dengan kinerja yang ada dan belum berfikir untuk melakukan peningkatan kemampuan dibidang manajemen keuangan karena sebagian pelaku usaha merasa kinerjanya sudah cukup baik dan usahanya tetap berjalan dengan

lancar dan tanpa kendala meskipun pelaku UMKM tidak membuat perencanaan anggaran dan pengendalian terhadap keuangan. Sikap tersebut apabila dibiarkan akan membuat kinerja UMKM menurun dan tidak mampu bersaing secara kompetitif di pasar. Seperti yang diungkapkan (Kiryanto, dkk. 2001) bahwa seorang pelaku usaha memerlukan motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola keuangan.

Sebagian besar perempuan, baik secara global maupun Indonesia, memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga. Para perempuan harus membuat keputusan keuangan sehari-hari karena laki-laki umumnya di sibukkan dengan aktivitas mencari nafkah di luar rumah. Selain itu, perempuan lebih cekatan dalam memegang keuangan, atau bertindak sebagai menteri keuangan keluarga. Laporan Bank Indonesia (2012) menunjukkan bahwa kesetaraan gender penting dalam proses peningkatan literasi keuangan. Dampak pemberdayaan perempuan dalam ekonomi sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi karena hal ini merupakan cara yang cerdas secara ekonomi. Jika perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi, ini akan membantu pengentasan kemiskinan. Di Indonesia kontribusi perempuan sebagai pengusaha khususnya pengusaha UMKM sudah cukup lama berkembang, dimana dapat dilihat dari jumlah pengusaha UMKM perempuan di Indonesia pada tahun 2012 totalnya mencapai 60% dari total pengusaha UMKM.

Penelitian BD Anggraeni (2016) studi kasus UMKM Depok, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh OJK dimana tingkat literasi keuangan terjadi pada Usaha Mikro dan Menengah masih sangat rendah . untuk itu dilakukan edukasi literasi keuangan yang ditujukan kepada pemilik UMKM agar pelaku usaha lebih mengenal keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan serta perencanaan keuangan agar pihak perbankan di Indonesia dapat lebih banyak menyalurkan kredit kepada pelaku usaha tersebut. Selama ini yang menjadi kendala bagi pihak perbankan yakni rendahnya literasi keuangan serta tidak adanya pencatatan atas transaksi usaha sehingga menyulitkan bagi pihak perbankan dan juga pelaku usaha. Adanya kucuran tambahan modal akan memberikan suntikan untuk menambah perputaran dana.

Pemilihan wilayah pada penelitian ini yaitu Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jumlah penduduk Kecamatan Purwoharjo sebanyak 75.683 jiwa, terdiri dari laki –laki 30.065 jiwa dan perempuan 35.640 jiwa yang tersebar pada 9 kelurahan. Berikut ini data jumlah penduduk Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Sex Ratio (%)
		Perempuan	Laki-laki		
1	Kradenan	4.756	4.154	8.910	93,97
2	Simbar	2.643	2.753	5.396	98,33
3	Sidorejo	5.670	2.193	7.863	96,36
4	Jatirejo	3.716	3.977	7.693	94,63
5	Plampangrejo	2.088	2.092	4.180	92,72
6	Perangan	2.599	2.746	5.345	97,36
7	Purwoharjo	5.274	5.365	10.639	93,87
8	Gumukrejo	3.734	3.676	7.410	92,80
9	Karetan	5.160	3.109	8.269	96,25
	<b>Total</b>	<b>35.640</b>	<b>30.065</b>	<b>75.683</b>	<b>98,36</b>

Sumber :BPS Kabupaten Banyuwangi (2016)

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Unit Pelaku Usaha di Pasar Kecamatan Purwoharjo**

Tahun	Jumlah Unit Pelaku Usaha		Lapak
	Perempuan	Laki-laki	
2015	23	16	39
2016	28	21	49
2017	36	26	62
2018	40	32	72
2019	45	35	80

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Purwoharjo 2019

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah UMKM perempuan di Pasar Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi saat ini tahun 2019 terdapat 45 pelaku usaha, sedangkan untuk pelaku usaha laki-laki berjumlah 35 dan terdapat 80 lapak. Dari tahun 2015-2019 dapat dilihat terdapat peningkatan pada pelaku usaha perempuan sekitar 48%, begitu juga pada pelaku usaha laki-laki meningkat sekitar 54%, sedangkan pada lapak terdapat peningkatan sekitar 51% . Alasan memilih pelaku usaha perempuan karena berdasarkan data di atas pelaku usaha perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Terbatasnya akses teknologi dan informasi merupakan hambatan untuk faktor pembatas ruang gerak bagi UMKM. Kecamatan Purwoharjo saat ini masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan.

Keterbatasan tersebut terletak pada SDM dari pelaku UMKM itu sendiri. Keterbatasan yang dialami tersebut diantaranya adalah permodalan yang kurang memadai untuk para pelaku UMKM itu sendiri sehingga dapat membuat usaha mereka terganggu, modal merupakan sesuatu hal yang penting dalam melakukan setiap usaha jika modal kurang memadai suatu usaha tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kurangnya pengetahuan dalam keuangan (*financial knowledge*), keterampilan mengelola keuangan (*financial skill*), rendahnya dalam menyikapi keuangan (*financial attitude*) dan perilaku keuangan (*financial behavior*) kurangnya berhati-hati dalam melakukan kredit, serta sempitnya lingkup pasar yang masih merupakan faktor pembatas ruang gerak UMKM. Sehingga penelitian tentang tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menarik untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut pendapat para ahli (Kaly, Hudson dan Vush 2008) dalam penelitian Widyawati (2012) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep – konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan secara tepat ke dalam perilaku. Menurut lembaga menyatakan bahwa secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Mengingat tingginya permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM perempuan di kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi terutama dalam pengelolaan keuangan dan minimnya pengetahuan dalam mendapatkan akses permodalan sebagai salah satu cara untuk memajukan usaha yang dikelola maka akan dilakukan analisis mengenai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di pasar Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Purwoharjo. Berdasarkan data dan informasi diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di pasar kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan *financial knowledge*, *financial behaviur*, *financial skill*, *financial attitude*, dan kinerja keuangan?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan di Pasar Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdasarkan *financial knowledge*, *financial behaviur*, *financial skill*, *financial attitude*, dan kinerja keuangan?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak diantaranya adalah:

1. Bagi pelaku UMKM perempuan di Pasar Kecamatan Purwoharjo: penelitian ini

dapat dijadikan saran dalam mengambil sebuah keputusan untuk meningkatkan keputusan bagi pelaku UMKM perempuan

2. Bagi peneliti: untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai literasi keuangan pelaku UMKM perempuan.

